

ABSTRAK

Kehadiran Undang-undang mengenai Desa selain untuk penguatan status desa yaitu sebagai pemerintahan dalam masyarakat desa, bahkan juga sebagai basis untuk mensejahterakan masyarakat dan memberdayakan masyarakat desa. Pemerintah desa mempunyai komponen penting dalam hal mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa yaitu melalui pengelolaan anggaran/keuangan desa dan pemberdayaan masyarakat. Kemunculan peraturan pengelolaan keuangan desa terbaru yakni Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 bertujuan untuk memberikan sebuah pemahaman dan komitmen yang memadai kepada Kepala Desa dalam melaksanakan keuangan desa, serta seluruh perangkat pemerintah desa dalam menjalankan tata kelola keuangan desa, sehingga dapat menghindari tindakan korupsi dan penyelewengan keuangan desa. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Desa Klompangan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember yang bertujuan untuk mengetahui penerapan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Klompangan dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban sehingga dapat dilihat bagaimana pengelolaan keuangan tersebut sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif dengan menguraikan, menggambarkan serta membandingkan antara proses pengelolaan keuangan desa di Desa Klompangan dengan acuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Semakin besar tingkat kesesuaian dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 maka semakin besar pula perwujudan asas transparansi, akuntabel dan partisipatif.

Kata Kunci : Permendagri No 20 Tahun 2018, Pengelolaan Keuangan Desa

ABSTRACT

The presence of law on the village in addition to strengthening the status of the village is a government in the village community, even as a base for the welfare of the community and the empowerment of rural communities. The village government has an important component in realizing the welfare of the villagers through the management of village budgets/finances and community empowerment. The emergence of the latest village financial management regulation, Permendagri number 20 year 2018 aims to provide an understanding and adequate commitment to the head of village in implementing the village finances, as well as all village government devices in running the village's financial governance, so as to avoid acts of corruption and financial malpractice of the village. This research was conducted at the village government of Klompangan, District Ajung, Jember Regency that aims to determine the implementation of the financial management of villages in the village of Klompangan from the planning, implementation, administration, reporting to accountability so that it can be seen how the financial management in accordance with Permendagri number 20 year 2018. This study used a descriptive method by describing, describing and comparing the process of village financial management in Kelompangan Village with the reference of Permendagri number 20 year 2018, so it can be withdrawn a conclusion. The greater the level of conformity with Permendagri number 20 year 2018, the greater the embodiment of the principle of transparency, accountability and participatory.

Keyword: *Permendagri number 20 years 2018, Village financial management*